



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Ninik Sri Listiyani**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **457215**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.197.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 679 m2/168 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 567.000.000
2. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **103.000.000**

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **22.725.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **228.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.550.725.000**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.550.725.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : MUTIARANINGTYAS SUKMAWATI
- Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
- NHK : 831260

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.350.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 850.350.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.500.000

- MOBIL, TOYOTA CALYA 1,2 G Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOTOR, HONDA REVO NF11T11C01 M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.223.278

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 980.073.278

III. HUTANG Rp. 160.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 820.073.278

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSKADARYANTO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 953441

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 73.564.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/22 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 73.564.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.000.000

1. MOTOR, HONDA S NF 100 SLD/SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT NC 11B3C A/T/SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.462.057

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 148.026.057

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 148.026.057

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

